

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
 BADAN LEMBINGAN HUKUM NASIONAL  
 JL. MAYOR JENDERAL SUPROYO TELUKAN  
 JAKARTA TIMUR

SUMBER B. Buana. HARI TELUKAN, Jumat, 25.0.2008 HUKUM 11/1.6

KODE 66

Dr Hasballah M Saad, Mantan Menteri Negara Hak Asasi Manusia

# Kendala Penegakan HAM, Banyak yang Kebal Hukum

Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia (Meneg HAM) termasuk yang dilikuidasi dalam kabinet *reshuffle* yang diumumkan Presiden Gus Dur, di Jakarta, Rabu (23/8). Penanganan masalah-masalah HAM kini di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Meski begitu, mantan Meneg HAM, Dr Hasballah M Saad tetap optimistis bahwa Pemerintah Gus Dur tetap akan memberikan perhatian yang serius kepada persoalan HAM di tanah air. Berikut ini pandangan Hasballah M Saad tentang upaya penegakan HAM ketika ia menjadi Meneg HAM selama 10 bulan. Ia menuturkannya kepada wartawan, termasuk Heru Suprantio dari Buana di Jakarta, Kamis (24/8).

*Kantor Meneg HAM termasuk yang dilikuidasi, bagaimana komentar Anda?*

Sekarang ada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di sini akan ada satu Dirjen yang namanya Dirjen HAM. Perhitungannya mungkin efisiensi, jika dilihat dari kaca mata birokrasi, bisa menghemat. Dengan pembentukan dirjen mungkin biaya lebih kecil jika dibandingkan dengan Menteri Negara. Meski hal ini tidak selamanya benar. Yang namanya Dirjen, pasti ada direktur, ada kanwil ke bawah, sampai ke daerah tingkat dua. Sedangkan Menteri Negara hanya membutuhkan 300 staf saja secara keseluruhan. Jadi belum tentu biaya sebuah dirjen, lebih murah dibandingkan dengan Menteri Negara.

Kemudian konstitusi kita telah diamandemen dan memberikan substansi HAM lebih banyak. Tuntutan luar negeri terhadap upaya perbaikan HAM di Indonesia semakin meningkat. Penyelesaian persoalan HAM di Indonesia belum baik. Masyarakat menunggu penyelesaian HAM. Dari banyak kasus yang ada, baru satu kasus yang diselesaikan lewat pengadilan, yakni di Aceh. Pada

hal kasus-kasus yang harus ditangani lebih banyak lagi, di Irian Jaya, Timor Timur, kasus 27 Juli. Banyak pelanggaran yang belum diselesaikan. Dengan demikian institusi ini seharusnya diberikan kekuatan yang lebih besar untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tetap saya tetap optimistis, sebab tugas penegakkan H/ M tidak semata-mata monopoli pemerintah. Di sinilah relevansinya, kita mendorong agar masyarakat lebih berperan aktif, seperti sejumlah LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang peduli HAM. Pemerintah sebagai koordinator, sehingga bisa mensinergikan seluruh potensi yang ada di masyarakat.

*Secara teknis, penghapusan Meneg HAM tidak bermasalah, tetapi secara politis akan timbul kesan pemerintah kembali kurang menaruh perhatian terhadap masalah ini?*

Saya juga sependapat, hanya saja Presiden Gus Dur pasti sudah melakukan pertimbangan yang sangat matang untuk mengambil keputusan seperti ini (meniadakan Meneg HAM). Dan saya yakin, presiden selalu membuat keputusan dengan tidak harga mati. Lihat saja dalam 10 bulan terakhir, kita telah lima kali *reshuffle* kabinet. Dan kabinet yang baru ini tidak akan *reshuffle* kalau tidak ada

kebutuhan. Sayangnya, setiap kali ada *reshuffle*, pasar sangat fluktuatif. Perbaikan keadaan tidak bisa dilakukan secara berkesinambungan. Dan, yang paling menderita tentu saja rakyat. Saya yakin kabinet yang sekarang ini cukup solid. Kita lihat perkembangannya selama setahun, kemudian nanti akan dinilai oleh MPR lewat Sidang Tahunan.

*Apa hambatan terbesar dalam penegakkan HAM di Indonesia?*

Para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu adalah orang-orang yang kebal hukum, yang umumnya dari aparat keamanan. Tetapi ada juga pelanggar HAM yang bukan aparat keamanan. Ini

tidak mudah, sebab ada mitos kelompok yang *impunity* (kebal hukuman). Militer bisa disebut sebagai salah satu kelompok yang *impunity*. Tetapi *Alhamdulillah* pimpinan militer sekarang sudah mulai terbuka, termasuk Kapolri. Selain itu ada dukungan publik. Sehingga di Aceh, para pelanggar HAM dari kalangan militer bisa diadili.

